



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

RENJA

Rencana Kerja Tahun 2021

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang menggambarkan permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta indikasi daftar Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang yaitu Tahun 2021, untuk memecahkan permasalahan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, ini di susun sebagai kelengkapan dokumen dan sebagai gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta besaran anggaran yang diperlukan pada Tahun Anggaran 2021.

Blambangan Umpu, Desember 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN



IKUAN AHMADI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021.....	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.2.1 Tujuan.....	33
3.2.2 Sasaran.....	34
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tujuan Dinas PMK Kab. Way Kanan	33
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	34

Lampiran-lampiran :

- 1. Tabel Renstra 2021-2026**
- 2. Tabel Matrik 2.1**
- 3. Tabel Matrik 2.2**
- 4. Tabel Matrik 2.3**
- 5. Tabel Matrik 2.4**
- 6. Tabel Matrik 3.1**
- 7. Struktur Organisasi**
- 8. IKU Dinas PMK Kab. Way Kanan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026, dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan,

dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021, dimana Program dan Kegiatan mengacu pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Way Kanan dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder, rapat forum SKPD dan berbagai dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan serta sinkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Provinsi Lampung maupun kebijakan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- Tahap perumusan rancangan Renja; dan
- Tahap penyajian rancangan Renja.

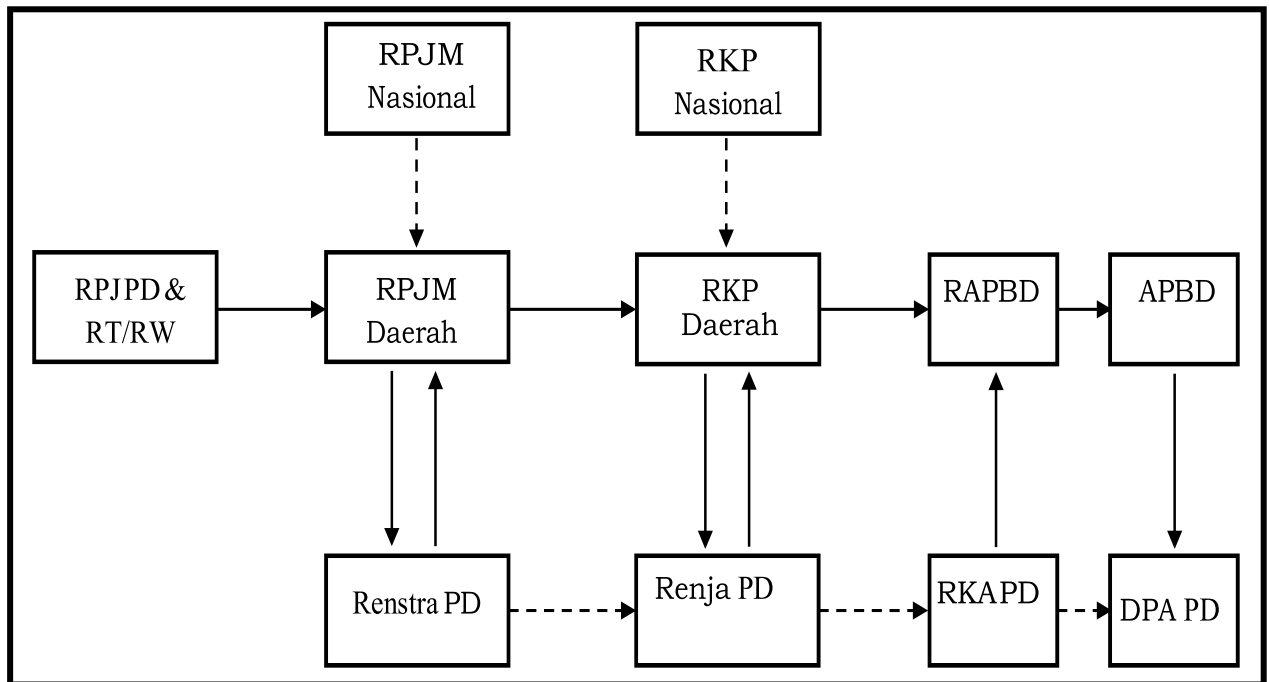
Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :

1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Way Kanan tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 3. Pengolahan data informasi;
 4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 8. Perumusan tujuan dan sasaran;
 9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 10. Perumusan kegiatan prioritas;
 11. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 12. Penyempurnaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 13. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan RKP, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.0
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi misi, dalam rangka mendukung Visi Pemerintahan Kabupaten Way Kanan yaitu **"Way Kanan Unggul dan Sejahtera"**, makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Unggul** : suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.
- Sejahtera** : kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Indikator unggul dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator Sejahtera adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara umum visi “unggul dan sejahtera” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”. Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam mendukung Misi Kabupaten Way Kanan yang

sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada misi satu dan misi ketiga, yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, dan “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”.

- b. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA-PPAS dan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada 2021.
- c. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja (RENJA) SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021, mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh

- seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dilengkapi dengan Indikator hasil (outcome), indikator kinerja (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Way Kanan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
27. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah;

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021.
- Melakukan Sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah :

- Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.1 terlampir)

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU (2020) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH TAHUN BERJALAN (2021)

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) dan perkiraan capaian tujuan tahun berjalan, untuk menjadi acuan pada APBD tahun 2021.
- b. Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- c. Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya :
 1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan SKPD;
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

(Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sesuai Tabel yang disajikan sebagaimana Lampiran 1).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- a. Capaian kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- b. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi;
- c. Analisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
 2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PMK;
 3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dins PMK Kabupaten Way Kanan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Secara struktur organisasi, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsi telah memenuhi kriteria organisasi yang diisyaratkan. **Keberadaan Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang (Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung dan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung)** telah sesuai dan dapat mendukung tugas dan fungsi SKPD. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat dan kampung. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
2. Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan;
3. Belum maksimalnya fungsi koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kecamatan dan kampung;
4. Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena belum efektifitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

6. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
8. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah kampung dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
9. Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan teknologi tepat guna dalam mengelola usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tercapai peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produksi hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat kampung dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana perkampungan.
11. Masih rendahnya pengetahuan Aparatur Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

Disamping permasalahan seperti pada poin (b) diatas, pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan memiliki tantangan dan peluang besar untuk meningkatkan pengembangan potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung baik pengaruh positif ataupun negatif, sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Kerja (Renja) SKPD kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan :

1. Potensi Kekuatan :

- (1) Terisinya seluruh Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (2) Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- (3) Adanya koordinasi yang baik antar bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (4) Adanya iklim yang kondusif didalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (5) Kepemilikan kewenangan dalam menyusun kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

- (6) Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan adalah rata-rata S-1 & S-2.

2. Potensi Kelemahan :

- (1) Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (meliputi : gedung, ruang arsip, kendaraan dinas untuk pelaksanaan monitoring ke lapangan dan sarana pendukung lainnya);
- (2) Kurangnya kuantitas pegawai (staf) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

3. Potensi Peluang :

- (1) Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (good government);
- (2) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar dari pihak kecamatan dan kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan ;
- (4) Tersedianya jaringan Internet online disemua SKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

4. Potensi Tantangan :

- (1) Sering berubahnya produk hukum Nasional;
- (2) Jarak tempuh yang relatif jauh antara kampung, kecamatan dan kabupaten;
- (3) Peran serta masyarakat dalam program pembangunan Kampung yang kurang, selama ini Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Pamong),

melaksanakan program-program desa yang bercorak *top-down*, atau setidaknya “*semi-top down*”, sementara input berupa peran aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan riil tidak berjalan maksimal;

- (4) Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) belum sepenuhnya mampu beriringan/sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung.
- d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan saat ini adalah :

1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif yang dikelola oleh keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena belum efektifitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

3. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
5. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah kampung dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
6. Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan teknologi tepat guna dalam mengelola usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tercapai peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produksi hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat kampung dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana perkampungan.
8. Masih rendahnya pengetahuan Aparatur Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel yang sesuai ketentuan perundang-undangan serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yaitu :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
5. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
6. Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

- Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
7. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi Renja SKPD pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
 8. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
 9. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Pedesaan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
 10. Kegiatan Koordinasi Pokjanal Posyandu pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
 11. Kegiatan Pembinaan Posyandu pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
 12. Kegiatan Pembinaan BUM Desa pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
 13. Kegiatan Lomba BUM Desa tingkat kabupaten dan provinsi pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan

tersebut tidak terealisasikan;

14. Kegiatan Koordinasi Peringatan BBGRM pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
15. Kegiatan Penataan Aparatur Pemerintah Kampung pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
16. Kegiatan Pelatihan Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset Kampung pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
17. Kegiatan Pengembangan Aparatur Kampung dalam Pemerintahan Kampung pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan; Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
18. Kegiatan Bintek Pengelolaan Program dan Penyuluhan (UP3-UP2K) pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
19. Kegiatan Pembinaan Kelompok UP2K pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;

20. Kegiatan Bintek Manajemen Pengelolaan UP2K pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
21. Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Nasional pada Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pedesaan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
22. Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
23. Kegiatan Pembinaan Tertib Administrasi Pembangunan Kampung pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
24. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
25. Kegiatan Lomba Kampung pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
26. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati bagi Pemerintahan di Kampung pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi;
27. Kegiatan Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung

(BPK) pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;

28. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Kampung pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

- a. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.
- b. Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini antara lain:
 1. Proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan di peroleh;
 2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD (Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat sesuai lampiran 1 Tabel 2.4).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten (Desentralisasi) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah, serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Pembinaan Pemerintahan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
2. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung;
3. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
5. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
6. Pelaksanaan administrasi dan Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan.

Dalam RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan :

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu ***”Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***.

b. Misi Ke-1 dan 3:

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021. Terkait yang menjadi tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengemban Misi kesatu dan Misi ketiga yaitu: Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

- c. Tujuan: **"1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung. 3.Menurunnya Tingkat Kemiskinan"**.

dengan indikator: "1.Nilai Evaluasi Sakip. 2.Indeks Desa Membangun. 3.Angka Kemiskinan".

- d. Sasaran: **"1.Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD, 2.Meningkatkan Kualitas Kampung. 3.Pemberdayaan Masyarakat Miskin"**.

dengan indikator: "1.Nilai Sakip OPD. 2.Indeks Kategori Kampung. 3.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin".

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) sebagai berikut:

3.2.1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung telah menetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu: **"1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung. 3.Menurunnya Tingkat Kemiskinan"**.

Tabel 3.1

Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
------------	---------------	-------------------------

1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun
3.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan

3.2.2. SASARAN

Untuk Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung
3.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Mengembangkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
2. Memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif untuk proses pembangunan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sebagai basis perekonomian daerah;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
6. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

SASARAN

Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat kampung ditentukan oleh sasaran sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kampung;
- d. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- e. Peningkatan Partisipasi dalam membangun desa;
- f. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- g. Peningkatan peran Perempuan di Pedesaan;
- h. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Way Kanan;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

Program dan Kegiatan Dinas PMK kabupaten Way Kanan Tahun 2021 direncanakan berjumlah 3 Program, 7 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 7.963.568.985,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*).

Adapun rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 6.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

B. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

- 1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;
- 1.9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 1.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
- 1.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- 1.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- 1.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - 1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - 1.6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 1.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;

1.9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan, telah direncanakan berjumlah 3 Program, 7 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 7.963.568.985,00 (*Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*).

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan disajikan dalam bentuk tabel 3.1 (tabel terlampir).

BAB V

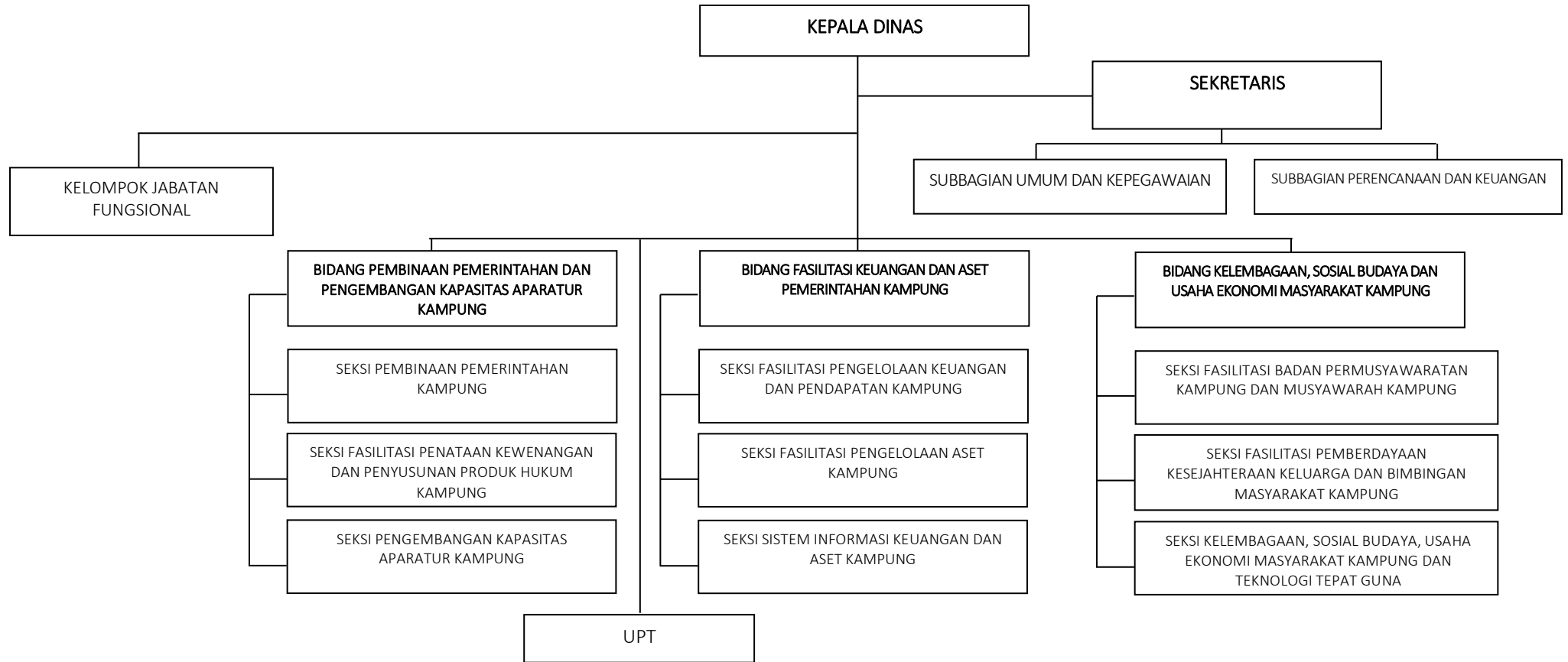
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran sesuai dengan karakteristik lokal dan kondisi faktual masyarakat di Kabupaten Way Kanan, maka disusunlah rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.

Agar kita dapat melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai Pedoman dan Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, sampai dengan tahapan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang dimulai dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta prioritas dan Plafon Anggaran sementara.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021, sebagai bahan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN



(Sumber : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018)

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

KABUPATEN WAY KANAN

Tahun 2021-2026

MISI 1 DAN 3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun 2022 Tahun-1		Tahun 2023 Tahun-2		Tahun 2024 Tahun-3		Tahun 2025 Tahun-4		Tahun 2026 Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah				Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	58,64 Poin	58.64		59.64		60.64		61.64		62.64		63.64			
	1.1.5. Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD			Nilai SAKIP OPD	50,34 Poin	50.34		52.75		55.17		57.58		60		62.5			
		1.1.3.46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas PMK	64,16 Poin	65.16	5,357,880	66.16	5,893,668	67.16	6,483,035	68.16	7,131,338	69.16	7,131,338	69.16	36,868,059	DINAS PMK	Way Kanan
		1.1.3.46.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	5,357,880	4	5,893,668	4	6,483,035	4	7,131,338	4	7,131,338	24	36,868,059	DINAS PMK	
		1.1.3.46.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	1,230,000	1	1,353,000	1	1,488,300	1	1,637,130	1	1,637,130	6	8,575,560		Way Kanan
		1.1.3.46.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1,250,600	1	1,375,660	1	1,513,226	1	1,664,549	1	1,664,549	6	8,718,583		Way Kanan
		1.1.3.46.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	1,195,200	1	1,314,720	1	1,446,192	1	1,590,811	1	1,590,811	6	8,333,534		Way Kanan
		1.1.3.46.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	1,682,080	1	1,850,288	1	2,035,317	1	2,238,848	1	2,238,848	6	11,240,382		Way Kanan
1.6. Meningkatkan Kinerja Organisasi				Nilai Komponen Kinerja Organisasi	4,95 Poin	5.25		5.55		5.85		6.15		6.45		6.45			
	1.6.2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Profesionalitas ASN	61 Poin	62		63		64		64		65		65			
		1.6.2.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	53,77 Poin	54.77	6,160,000	55.77	6,776,000	56.77	7,453,600	57.77	7,453,600	57.77	8,198,960	57.77	41,642,160		

		1.6.2.9.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3	6,160,000	3	6,776,000	3	7,453,600	3	7,453,600	3	8,198,960	18	41,642,160	
		1.6.2.9.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	2,185,700	1	2,404,270	1	2,644,697	1	2,644,697	1	2,909,167	6	14,775,531	Way Kanan
		1.6.2.9.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	1,991,000	1	2,190,100	1	2,409,110	1	2,409,110	1	2,650,021	6	13,459,341	Way Kanan
		1.6.2.9.1.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1	1,983,300	1	2,181,630	1	2,399,793	1	2,399,793	1	2,639,772	6	13,407,288	Way Kanan
	1.6.4. Menyenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		100	100	0	100	100	100	100	100	100		
		1.6.4.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	5,395,785,135	100	5,394,633,347	100	5,393,366,380	100	5,491,972,717	100	5,491,972,717	100	32,071,923,981	
		1.6.4.9.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		32	5,047,118,135	33	5,024,139,647	34	5,060,546,580	35	5,136,080,937	36	5,136,080,937	202	29,976,289,921	
		1.6.4.9.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22	4,818,206,360	23	4,833,633,803	24	4,833,633,803	25	4,888,581,351	26	4,888,581,351	142	28,642,824,268	Way Kanan
		1.6.4.9.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5	91,920,000	5	91,920,000	5	91,920,000	5	101,112,000	5	101,112,000	30	559,584,000	Way Kanan
		1.6.4.9.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	4,544,681	1	4,497,381	1	4,544,681	1	4,544,681	1	4,544,681	6	25,742,105	Way Kanan
		1.6.4.9.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	27,968,404	1	28,071,904	1	28,133,881	1	30,947,269	1	31,004,502	6	168,518,145	Way Kanan
		1.6.4.9.1.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	3,978,690	1	4,376,559	1	4,814,215	1	5,295,636	1	5,238,403	6	27,281,403	Way Kanan
		1.6.4.9.1.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	16,500,000	1	11,640,000	1	16,500,000	1	16,500,000	1	16,500,000	6	94,140,000	Way Kanan

		1.6.4.9.1.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1	84,000,000	1	50,000,000	1	81,000,000	1	89,100,000	1	89,100,000	6	458,200,000	Way Kanan
		1.6.4.9.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	246	290,400,000	
		1.6.4.9.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	216	140,400,000	Way Kanan
		1.6.4.9.2.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	30	150,000,000	Way Kanan
		1.6.4.9.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16	77,000,000	16	81,500,000	16	75,000,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	475,500,000	
		1.6.4.9.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12	42,000,000	12	43,000,000	12	40,000,000	12	44,000,000	12	44,000,000	72	255,000,000	Way Kanan
		1.6.4.9.3.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4	35,000,000	4	38,500,000	4	35,000,000	4	38,500,000	4	38,500,000	24	220,500,000	Way Kanan
		1.6.4.9.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9	133,947,000	9	147,341,700	9	124,719,800	9	130,791,780	9	130,791,780	54	789,362,060	
		1.6.4.9.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4	69,300,000	4	76,230,000	4	64,000,000	4	64,000,000	4	64,000,000	24	400,530,000	Way Kanan
		1.6.4.9.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2	6,380,000	2	7,018,000	2	7,719,800	2	8,491,780	2	8,491,780	12	43,901,360	Way Kanan
		1.6.4.9.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3	58,267,000	3	64,093,700	3	53,000,000	3	58,300,000	3	58,300,000	18	344,930,700	Way Kanan
		1.6.4.9.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20	89,320,000	20	93,252,000	20	84,700,000	20	94,200,000	20	94,200,000	120	540,372,000	

		1.6.4.9.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	12	300,000,000		Way Kanan
		1.6.4.9.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16	10,120,000	16	11,132,000	16	9,200,000	16	9,200,000	16	9,200,000	96	58,052,000		Way Kanan
		1.6.4.9.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2	29,200,000	2	32,120,000	2	25,500,000	2	35,000,000	2	35,000,000	12	182,320,000		Way Kanan
1.9. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Kampung				Indeks Desa Membangun	0, 6558 Poin	0.6583		0.6608		0.6633		0.6658		0.6683		0.6683			
	1.9.1. Meningkatkan Kualitas Kampung			Indeks Kategori Kampung	3,05 Poin	3.13	3,864,654,500	3.19	3,375,753,600	3.25	3,375,753,600	3.29	3,375,753,600	3.29	3,375,753,600	3.29	21,232,323,400		
		1.9.1.1	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%	14	100,000,000	16	100,000,000	18	100,000,000	20	100,000,000	23	100,000,000	23	600,000,000	DINAS PMK	
		1.9.1.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Peningkatan Kualitas Kampung															
		1.9.1.1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	1105	330,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	1105	270,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%	10	200,403,600	14	200,403,600	21	200,403,600	23	200,403,600	25	200,403,600	25	1,202,421,600	DINAS PMK	
		1.9.1.2.1	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa															
		1.9.1.2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	24	1,202,421,600	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%	100	809,843,400	100	320,942,500	100	320,942,500	100	320,942,500	100	320,942,500	100	2,903,456,800	DINAS PMK	
		1.9.1.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
		1.9.1.3.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	221 Dokumen	221	83,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	1326	342,416,000	DINAS PMK	Way Kanan

		1.9.1.3.1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	221 Laporan	118	320,900,900	0	-	0	-	0	-	0	203	641,801,800	DINAS PMK	Way Kanan	
		1.9.1.3.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	221 Dokumen	221	85,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	1326	374,224,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3.1.4	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	221 Orang	221	45,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	1326	233,477,600	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3.1.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1	93,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	6	451,537,400	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3.1.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	221 Dokumen	221	55,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	1326	250,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	221 Orang	221	65,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	1326	270,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3.1.8	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	221 Laporan	221	35,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	1326	190,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.3.1.9	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	221 Desa	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	1326	150,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	2,053,554,000	DINAS PMK	
		1.9.1.4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
		1.9.1.4.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	221 Dokumen	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	1326	447,241,800	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.4.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	221 Dokumen	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	1326	512,693,400	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.4.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20 Dokumen	20	99,769,800	50	99,769,800	21	99,769,800	21	99,769,800	21	99,769,800	153	598,618,800	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.4.1.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	221 Dokumen	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	1326	495,000,000	DINAS PMK	Way Kanan

		1.9.1.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%	43	2,412,148,500	51	2,412,148,500	55	2,412,148,500	60	2,412,148,500	66	2,412,148,500	66	14,472,891,000	DINAS PMK	
		1.9.1.5.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga AdatTingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat															
		1.9.1.5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	24	392,076,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.5.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkat Kapasitasnya	1 Lembaga	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	6	540,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.9.1.5.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27 Unit	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	162	454,500,000	DINAS PMK	Way Kanan

		1.6.3.14.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	24	1,200,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		1.6.3.14.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1	421,713,500	1	421,713,500	1	331,540,101	1	421,713,500	1	421,713,500	6	2,450,661,101	DINAS PMK	Way Kanan
	1.6.4. Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak			Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi dengan Berbagai Pihak	%	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	531,540,000	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	3,650,661,000		
		3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang diberdayakan Melalui Dana Desa	%	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,000	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,000	DINAS PMK	

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Way Kanan

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2016+2017+2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1 22 0 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 22 0 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya belanja langganan telephone, air, listrik & surat kabar	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Honor penjaga malam & tukang kebersihan	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya belanja ATK selama 1 tahun	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 11	Penyediaan Brg Cetak & Penggandaan	Terlaksananya penggandaan & Photo Copy selama 1 tahun	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan alat listrik dan Instalasinya	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya belanja peralatan rumah tangga	189 M2/Buah	189 M2/Buah	- M2/Buah	- M2/Buah	#DIV/0!	- M2/Buah	- M2/Buah	0%
1 22 0 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyediaan buku-buku bacaan	61 buku	61 buku	- buku	- buku	#DIV/0!	- buku	61 buku	100%
1 22 0 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 01 18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam daerah & Luar Daerah	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2016+2017+2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) 10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 22 0 02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur									
1 22 0 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	14 Unit	6 Unit	- Unit	- unit	#DIV/0!	- Unit	6 Unit	43%
1 22 0 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Belanja Modal Perlengkapan Kantor	40 Unit	8 Unit	- Unit	- unit	#DIV/0!	- Unit	8 Unit	20%
1 22 0 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Belanja Peralatan Kantor	49 Unit	18 Unit	5 Unit	5 unit	100%	- Unit	23 Unit	47%
1 22 0 02 10	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Belanja Pengadaan Meubelair	48 Unit	13 Unit	42 Unit	42 unit	100%	- Unit	55 Unit	115%
1 22 0 02 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran).	Terikutinya Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten	10 kali	3 kali	- kali	- kali	#DIV/0!	- kali	3 kali	30%
1 22 0 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan halaman kantor	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	60 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	60 Bln	100%
1 22 0 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1 22 0 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya	5 kali	2 kali	- kali	- kali	#DIV/0!	- kali	2 kali	40%
1 22 0 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan Pakaian KORPRI dan Batik	5 kali	1 kali	- kali	- kali	#DIV/0!	- kali	1 kali	20%
1 22 0 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1 22 0 05 03	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 kali	2 kali	- kali	- kali	#DIV/0!	- kali	2 kali	40%
1 22 0 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1 22 0 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP	5 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	5 Dok	100%
1 22 0 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Semester Anggaran	10 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	7 Dok	70%
1 22 0 06 03	Penyusunan Palaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran	5 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	5 Dok	100%
1 22 0 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	5 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	5 Dok	100%
1 22 0 06 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	10 Dok	6 Dok	- Dok	- Dok	#DIV/0!	- Dok	6 Dok	60%
1 22 0 06 06	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP	5 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	5 Dok	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2016+2017+2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 22 0 06 07	Penyusunan Renja	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja	5 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	5 Dok	100%
1 22 0 06 08	Penyusunan RKA dan DPA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKA dan DPA)	10 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	4 Dok	40%
1 22 0 06 09	Penyusunan Laporan Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan	5 Dok	1 Dok	- Dok	- Dok	#DIV/0!	- Dok	1 Dok	20%
1 22 0 06 10	Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan	5 Dok	1 Dok	- Dok	- Dok	#DIV/0!	- Dok	1 Dok	20%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2016+2017+2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 22 1 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.									
1 22 1 18 03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Kampung	Terwujudnya kemampuan Sekretaris kampung dalam bidang manajemen pemerintahan Kampung	1,105 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	663 Kpg	60%
1 22 1 18 10	Pelatihan Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset Kampung	Meningkatkan Pengetahuan Aparatur tentang Pengelolaan Aset Kampung	1,105 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	663 Kpg	60%
1 22 1 18 11	Pengembangan Aparatur Kampung dalam Pemerintahan Kampung	Terwujudnya kemampuan kaur Pemerintahan Kampung	1,105 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	663 Kpg	60%
1 22 1 18 12	Pembinaan Kepala Kampung Terpilih dalam Wilayah Kabupaten	Terwujudnya kemampuan Kepala Kampung dalam Pemerintahan	221 Kpg	-	118 Kpg	118 Kpg	100%	-	118 Kpg	53%
1 22 1 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan									
1 22 1 19 01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Meningkatkan keterampilan perempuan di pedesaan	1,440 Org	800 Org	160 Org	160 Org	100%	160 Org	1,120 Org	78%
1 22 1 19 04	Bimtek Pengelolaan Program dan Penyuluhan (UP3-UP2K)	Meningkatkan pengetahuan Kader UP2K tentang tata cara Peningkatan Pendapatan	640 Kader	160 Kader	120 Kader	120 Kader	100%	120 Kader	400 Kader	63%
1 22 1 19 06	Pembinaan Kelompok UP2K	Terbinanya kelompok UP2K kelompok Sulam Usus	20 Kel	4 Kel	4 Kel	4 Kel	100%	4 Kel	12 Kel	60%
1 22 1 19 07	Bimtek Manajemen Pengelolaan UP2K	Meningkatkan kemampuan manjerial Kader UP2K Kabupaten	300 Kader	60 Kader	60 Kader	60 Kader	100%	60 Kader	180 Kader	60%
1 22 1 20	Perogram Pengembangan TTG Pedesaan									
1 22 1 20 01	Pameran / Gelar TTG Tingkat Nasional	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan kelompok binaan Pengembangan TTG	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	3 Kali	60%
1 22 1 20 02	Pelatihan Kelompok Binaan TTG	Terbinanya penemu TTG di Way Kanan dan meningkatkan kemampuan kelompok TTG	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	3 Kali	60%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2016+2017+2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 22 1 21	Perogram Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa									
1 22 1 21 01	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kampung	Fasilitas terhadap aparatur kampung dalam pengelolaan keuangan kampung	1,105 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	663 Kpg	60%
1 22 1 21 02	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa	Terselenggaranya koordinas dan kemitraan	495 PGD & PD	99 PGD & PD	99 PGD & PD	99 PGD & PD	100%	99 PGD & PD	297 PGD & PD	60%
1 22 1 21 03	Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung	Memberikan Pengetahuan penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan dan asset	442 Kpg	-	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	442 Kpg	100%
	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung melalui SisKeuDes	Meningkatkan kemampuan Sekretaris & Operator Kampung dlm mengelola Keuangan Desa melalui SisKeuDes.	221 Kpg	-	-	-	-	-	-	0%
1 22 1 21 04	Inventaris dan Pendataan Aset Kampung	Terbentuknya data Aset 221 kampung	1,105 Kpg	-	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	442 Kpg	40%
1 22 1 22	Program Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan Kampung									
1 22 1 22 01	Pembinaan Tertib Administrasi Pembangunan Kampung	Kemampuan Kaur Pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan	1,105 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	663 Kpg	60%
1 22 1 22 02	Penguatan Tim Penyusunan Peraturan Kampung	Tersusunya Peraturan kampung	221 Kpg	-	221 Kpg	221 Kpg	100%	-	221 Kpg	100%
1 22 1 22 03	Evaluasi Perkembangan Kampung	Terpilihnya Kampung berprestasi	70 Kpg	14 Kpg	14 Kpg	14 Kpg	100%	14 Kpg	42 Kpg	60%
1 22 1 22 04	Fasilitas Penataan Kewenangan Kampung	Tersusunya Peraturan tentang kewenangan kampung	442 Kpg	- Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	442 Kpg	100%
	Pembinaan Kampung Tertinggal	Terbinanya Kampung Tertinggal	56 Kpg	-	-	-	-	-	-	0%
1 22 1 22 05	Pembinaan Kampung Percontohan	Terbinanya Perkembangan Administrasi Kampung	9 Kpg	- Kpg	3 Kpg	- Kpg	0%	3 Kpg	3 Kpg	33%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2016+2017+2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 22 1 22 06	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bagi Pemerintahan di Kampung	Tersusunya Rancangan Perbup di bidang Pemerintahan kampung	12 Perbup	-	10 Perbup	9 Perbup	90%	2 Perbup	11 Perbup	92%
	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Penataan Pemerintahan Kampung	Tersusunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pentaaan Pemerintahan kampung	6 Perda	-	3 Perda	- Perda	0%	2 Perda	2 Perda	33%
1 22 1 22 07	Peningkatan Kapaitas BPK	Peningkatan Kualitas SDM BPK	1,105 Kpg	221 Kpg	22 Kpg	221 Kpg	1005%	221 Kpg	663 Kpg	60%
1 22 1 22 08	Fasilitasi dan Asistensi Musyawarah Kampung	Terlaksananya Musyawarah Kampung yang Demokratis	1,105 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	221 Kpg	100%	221 Kpg	663 Kpg	60%

Blambangan Umpu, April 2020

Mengetahui,
 KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 KABUPATEN WAY KANAN,

IXUAN AHMADI, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 19751101 199503 1 001

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016, 2017, 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2016, 2017, 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya belanja langganan telephone, air, listrik & surat kabar			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
2	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
3	Terbayarnya Honor penjaga malam & tukang kebersihan			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
4	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
5	Terlaksananya belanja ATK selama 1 tahun			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
6	Terlaksananya penggandaan & Photo Copy selama 1 tahun			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya penyediaan alat listrik dan Instalasinya			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
8	Terlaksananya belanja peralatan rumah tangga			2 paket	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2017 Rasionalisasi Anggaran dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
9	Terlaksananya Penyediaan buku-buku bacaan			2 paket	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2016 tidak dianggarkan

10	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
11	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam daerah & Luar Daerah			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
12	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas			6 unit	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2017 Racionalisasi Anggaran dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
13	Terlaksananya Belanja Modal Perlengkapan Kantor			8 unit	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2017 Racionalisasi Anggaran dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
14	Terlaksananya Belanja Peralatan Kantor			18 unit	5 unit	-	9 unit	100%	100%	0%	100%	Tahun 2017 Racionalisasi Anggaran dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
15	Terlaksananya Belanja Pengadaan Meubelair			13 unit	42 unit	-	10 unit	100%	100%	0%	100%	Tahun 2017 Racionalisasi Anggaran dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
16	Terikutinya Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten			3 kali	-	-	-	100%	0%	0%	0%	
17	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan halaman kantor			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas			36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	
19	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya			38 orang (1 stel) dan 35 orang (1 stel)	-	-	35 orang (1 stel)	100%	0%	0%	100%	Tahun 2017 Racionalisasi Anggaran

20	Terlaksananya pengadaan Pakaian KORPRI dan Batik			38 orang (2 stel)	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2017 Racionalisasi Anggaran dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
21	Terlaksananya bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			2 kali	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2016 Racionalisasi Anggaran
22	Terlaksananya penyusunan LAKIP			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak dianggarkan
23	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester			4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	
24	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	
25	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	
26	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan			6 dokumen	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2018 tidak dianggarkan
27	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	
28	Terlaksananya Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD			-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0%	100%	100%	100%	
29	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	Tahun 2016 dan 2017 tidak dianggarkan
30	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan			1 dokumen	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2016, 2017, 2019, 2020 dan 2021 tidak dianggarkan
31	Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan			1 dokumen	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2016, 2017, 2019, 2020 dan 2021 tidak dianggarkan

32	Semakin berkembangnya peran serta dan meningkatnya swadaya masyarakat dalam lembaga pemberdayaan masyarakat			608 org	221 orang	454 orang	663 orang	100%	100%	100%	100%	
33	Peningkatan Kualitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat			221 kampung	-	-	-	100%	0%	0%	0%	Tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak dianggarkan
34	Meningkatnya Kemampuan Pengurus kelembagaan masyarakat			3 Kampung	-	-	-	-	100%	100%	100%	
35	Terlaksananya Program Kerja PKK Kabupaten Way Kanan			28 Kecamatan	2 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	-	100%	100%	100%	
36	Meningkatnya manajerial BUMDes			84 BUMDes	28 BUMDes	20 BUMDes	30 BUMDes	-	100%	100%	100%	
37	Penumbuhan BUMDes			226 BumDes	-	55 kampung	55 kampung	-	-	100%	100%	
38	Pemilihan Kepala Kampung serentak			143 Kampung	-	86 kampung	-	-	100%	100%	100%	
39	Meningkatkan semangat gotong royong di pedesaan			42 Kec & 3 Kpg utk Tk. Prov	14 Kec & 1 Kpg utk Tk. Prov	14 Kec & 1 Kpg utk Tk. Prov	14 Kec & 1 Kpg utk Tk. Prov	84%	100%	100%	100%	
40	Meningkatkan semangat kegotong royongan dan kemandirian TNI			3 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec	100%	100%	100%	100%	
41	Meningkatkan Pelayanan Posyandu terhadap Masyarakat			8 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kec	4 Kec	-	-	100%	100%	
42	Meningkatkan Pelayanan Posyandu terhadap Masyarakat			6 Posyandu	4 Posyandu	-	80 Posyandu	100%	100%	100%	100%	
43	Terwujudnya kemampuan Sekretaris kampung dalam bidang manajemen pemerintahan			663 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	98%	100%	100%	100%	
44	Meningkatkan Pengetahuan Aparatur tentang Pengelolaan Aset Kampung			556 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	100%	100%	100%	
45	Terwujudnya kemampuan kaur Pemerintahan Kampung			351 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	

46	Terwujudnya kemampuan Kepala Kampung dalam Bid. Pemerintahan			86 Kampung	118 Kakamp	-	103 Kakamp	-	-	100%	100%	
47	Meningkatkan keterampilan perempuan di pedesaan			60 orang	160 orang	160 orang	160 orang	92%	100%	100%	100%	
48	Meningkatkan pengetahuan Kader UP2K tentang tata cara Peningkatan Pendapatan			120 Kader	120 Kader	80 Kader	120 Kader	100%	100%	100%	100%	
49	Terbinanya kelompok UP2K kelompok Sulam Usus			8 Kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	-	-	100%	100%	
50	Meningkatkan kemampuan manjerial Kader UP2K Kabupaten			120 Kader	60 kader	100 kader	60 kader	-	-	100%	100%	
51	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan kelompok binaan Pengembangan TTG			3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	
52	Terbinanya penemu TTG di Way Kanan dan meningkatkan kemampuan kelompok TTG			2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	100%	100%	
53	Fasilitasi terhadap aparat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung			442 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	
54	Terselenggaranya koordinas dan kemitraan			99 PD & PGD	99 PD & PGD	99 PD & PGD	99 PD & PGD	-	100%	100%	100%	
55	Memberikan Pengetahuan penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan dan asset			221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	
56	Terbentuknya data Aset 221 kampung			442 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	
57	Kemampuan Kaur Pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan			663 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	
58	Tersusunnya Peraturan kampung			-	221 Kampung			-	-	100%	100%	
59	Terpilihnya Kampung berprestasi			20 Kampung Juara I.II.III	14 kampung			100%	-	100%	100%	
60	Tersusnya Peraturan tentang kewenangan kampung			442 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	

61	Terbinanya Perkembangan Administrasi Kampung			442 Kampung	3 kampung			-	-	100%	100%	
62	Tersusunya Rancangan Perbup di bidang Pemerintahan kampung			442 Kampung	-			-	-	100%	100%	
63	Peningkatan Kualitas SDM BPK			321 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	
64	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Kampung dengan baik			441 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	221 Kampung	-	-	100%	100%	

Blambangan Umpu, Februari 2020
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN,

IXUAN AHMADI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19751101 199503 1 001

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Way Kanan

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Blambangan Umpu	Nilai SAKIP Dinas PMK	100%	4,914,664,485.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Blambangan Umpu	Nilai SAKIP Dinas PMK	100%	4,914,664,485.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,167,500.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,167,500	
1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen renja skd dan dokumen evaluasi renja skpd	100%	1,483,000.00	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen renja skd dan dokumen evaluasi renja skpd	100%	1,483,000	
2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen rka dan dpa skpd	100%	1,688,600.00	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen rka dan dpa skpd	100%	1,688,600	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100%	1,297,200.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100%	1,297,200	
4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen lakip skpd	100%	1,698,700.00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen lakip skpd	100%	1,698,700	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,738,690,900.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,738,690,900	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Blambangan Umpu	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%	4,653,026,600.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Blambangan Umpu	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%	4,653,026,600	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan atau terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan skpd	100%	81,600,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan atau terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan skpd	100%	81,600,000	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	1,588,400.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	1,588,400	

4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sub Kegiatan	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	100%	1,371,900.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sub Kegiatan	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	100%	1,371,900
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	100%	1,104,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	100%	1,104,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	45,536,085.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	45,536,085
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	3,066,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	3,066,000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	100%	22,392,185.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	100%	22,392,185
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	3,577,900.00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	3,577,900
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	100%	16,500,000.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	100%	16,500,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		121,770,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		121,770,000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	63,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	63,000,000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	5,800,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	5,800,000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	52,970,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Blambangan Umpu	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	52,970,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,500,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Blambangan Umpu	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,500,000

1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Blambangan Umpu	Jumlah kendaraan roda empat yang mendapat biaya pemeliharaan	100%	2,500,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Blambangan Umpu	Jumlah kendaraan roda empat yang mendapat biaya pemeliharaan	100%	2,500,000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Blambangan Umpu	Cakupan Tertib Administrasi Kampung dan Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	100%	1,152,102,400.00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Blambangan Umpu	Cakupan Tertib Administrasi Kampung dan Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	100%	1,152,102,400
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	-
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	Jumlah sekretaris kampung yang terlatih	100%	83,736,000.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Blambangan Umpu	Jumlah sekretaris kampung yang terlatih	100%	83,736,000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Blambangan Umpu	Terlaksananya pelatihan aplikasi sistem informasi keuangan kampung	100%	74,540,300.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Blambangan Umpu	Terlaksananya pelatihan aplikasi sistem informasi keuangan kampung	100%	74,540,300
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Blambangan Umpu	Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung	100%	85,448,900.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Blambangan Umpu	Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung	100%	85,448,900
4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Blambangan Umpu	Jumlah pelaksanaan lomba bumdes tk kabupaten wk dan jumlah peserta bimtek manajemen bumdes	100%	99,769,800.00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Blambangan Umpu	Jumlah pelaksanaan lomba bumdes tk kabupaten wk dan jumlah peserta bimtek manajemen bumdes	100%	99,769,800
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	Blambangan Umpu	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung tahun 2021	100%	488,900,900.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	Blambangan Umpu	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung tahun 2021	100%	488,900,900
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Blambangan Umpu	Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi penyusunan profil kampung	100%	90,704,000.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Blambangan Umpu	Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi penyusunan profil kampung	100%	90,704,000
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Blambangan Umpu	Jumlah peserta pelatihan aparatur kampung dalam bidang pengelolaan aset	100%	82,500,000.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Blambangan Umpu	Jumlah peserta pelatihan aparatur kampung dalam bidang pengelolaan aset	100%	82,500,000
8	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Blambangan Umpu	Jumlah kampung yang mendapat pembinaan BPK	100%	45,579,600.00	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Blambangan Umpu	Jumlah kampung yang mendapat pembinaan BPK	100%	45,579,600

9	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Blambangan Umpu	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung	100%	100,922,900.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Blambangan Umpu	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung	100%	100,922,900	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Blambangan Umpu	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	100%	1,896,802,100.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Blambangan Umpu	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	100%	1,896,802,100	
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga AdatTingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Blambangan Umpu	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga AdatTingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Blambangan Umpu	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	-	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Blambangan Umpu	Terbayarnya honor pendamping desa, pendamping lokal desa dan tenaga ahli	100%	200,403,600.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Blambangan Umpu	Terbayarnya honor pendamping desa, pendamping lokal desa dan tenaga ahli	100%	200,403,600	
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Blambangan Umpu	Jumlah poskesdes yang mendapatkan pembinaan tentang posyandu	100%	65,346,000.00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Blambangan Umpu	Jumlah poskesdes yang mendapatkan pembinaan tentang posyandu	100%	65,346,000	

4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen data TTG dan Jumlah pameran / gelar TTG	100%	195,352,900.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Blambangan Umpu	Jumlah dokumen data TTG dan Jumlah pameran / gelar TTG	100%	195,352,900	
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Blambangan Umpu	Pelaksanaan karya bhakti dan TMMD Reguler di Kabupaten	100%	1,116,900,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Blambangan Umpu	Pelaksanaan karya bhakti dan TMMD Reguler di Kabupaten	100%	1,116,900,000	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Blambangan Umpu	Terlaksananya program kerja PKK Kab. Way Kanan	100%	318,799,600.00	Penyusunan Palaporan Keuangan Semesteran	Blambangan Umpu	Terlaksananya program kerja PKK Kab. Way Kanan	100%	318,799,600	
JUMLAH					7,963,568,985.00					7,963,568,985.00	

Blambangan Umpu, Februari 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN

IXUAN AHMADI. S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19751101 199503 1 001

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN WAY KANAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYAN DASAR
 SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	RENCANA TAHUN 2021				Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
					Kebutuhan dana/Pagu Indikatif						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif				
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
02	WAJIB NON PELAYAN DASAR/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	BELANJA LANGSUNG															
02	13	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Way Kanan	100%	4,686,626,600.00	228,037,885.00	-	4,914,664,485.00	APBD Kabupaten Way Kanan		100%	5,406,130,933.50	
02	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD dan Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Blambangan Umpu	2 Dokumen	-	1,483,000.00	-	1,483,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan		2 Dokumen	1,631,300.00
02	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	Blambangan Umpu	2 Dokumen	-	1,688,600.00	-	1,688,600.00	APBD Kabupaten Way Kanan		2 Dokumen	1,857,460.00
02	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,297,200.00	-	1,297,200.00	APBD Kabupaten Way Kanan		1 Dokumen	1,426,920.00
02	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen lakip SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,698,700.00	-	1,698,700.00	APBD Kabupaten Way Kanan		1 Dokumen	1,868,570.00
02	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Blambangan Umpu	12 Bulan	4,653,026,600.00	-	-	4,653,026,600.00	APBD Kabupaten Way Kanan		12 Bulan	5,118,329,260.00
02	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD	Blambangan Umpu	12 Bulan	33,600,000.00	48,000,000.00	-	81,600,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan		12 Bulan	89,760,000.00
02	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,588,400.00	-	1,588,400.00	APBD Kabupaten Way Kanan		1 Dokumen	1,747,240.00
02	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Blambangan Umpu	2 Dokumen	-	1,371,900.00	-	1,371,900.00	APBD Kabupaten Way Kanan		2 Dokumen	1,509,090.00
02	13	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,104,000.00	-	1,104,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan		1 Dokumen	1,214,400.00
02	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	3,066,000.00	-	3,066,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan		12 Bulan	3,372,600.00
02	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	22,392,185.00	-	22,392,185.00	APBD Kabupaten Way Kanan		12 Bulan	24,631,403.50
02	13	01	2.06	05	Penyediaan Brg Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	3,577,900.00	-	3,577,900.00	APBD Kabupaten Way Kanan		12 Bulan	3,935,690.00
02	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	16,500,000.00	-	16,500,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan		12 Bulan	18,150,000.00

02	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	63,000,000.00	-	63,000,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	12 Bulan	69,300,000.00
02	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	52,970,000.00	-	52,970,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	12 Bulan	58,267,000.00
02	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	5,800,000.00	-	5,800,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	12 Bulan	6,380,000.00
02	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat yang mendapat biaya pemeliharaan	Blambangan Umpu	2 kendaraan	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	2 kendaraan	2,750,000.00
02	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Tertib Administrasi Kampung dan Cakupan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	Kab. Way Kanan	100%	-	1,147,102,400.00	5,000,000.00	1,152,102,400.00	APBD Kabupaten Way Kanan	100%	1,267,312,640.00
02	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah sekretaris kampung yang terlatih	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	83,736,000.00	-	83,736,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	221 Kampung	92,109,600.00
02	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pelatihan aplikasi sistem informasi keuangan kampung	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	74,540,300.00	-	74,540,300.00	APBD Kabupaten Way Kanan	221 Kampung	81,994,330.00
02	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	85,448,900.00	-	85,448,900.00	APBD Kabupaten Way Kanan	221 Kampung	93,993,790.00
02	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pelaksanaan lomba BUMDes tingkat kabupaten way kanan dan jumlah peserta bimtek manajemen BUMDes	Kab. Way Kanan	1 Kali Lomba dan 20 Orang Peserta Bimtek Bumdes	-	94,769,800.00	5,000,000.00	99,769,800.00	APBD Kabupaten Way Kanan	1 Kali Lomba dan 20 Orang Peserta Bimtek Bumdes	109,746,780.00
02	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung tahun 2021	Kab. Way Kanan	85 kampung	-	488,900,900.00	-	488,900,900.00	APBD Kabupaten Way Kanan	85 kampung	537,790,990.00
02	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi penyusunan profil kampung	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	90,704,000.00	-	90,704,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	221 Kampung	99,774,400.00
02	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta pelatihan aparatur kampung dalam bidang pengelolaan aset	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	82,500,000.00	-	82,500,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	221 Kampung	90,750,000.00
02	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah kampung yang mendapat pembinaan BPK	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	45,579,600.00	-	45,579,600.00	APBD Kabupaten Way Kanan	221 Kampung	50,137,560.00
02	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung	Kab. Way Kanan	14 Kecamatan	-	100,922,900.00	-	100,922,900.00	APBD Kabupaten Way Kanan	14 Kecamatan	111,015,190.00
02	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Kab. Way Kanan	43%	-	1,896,802,100.00	-	1,896,802,100.00	APBD Kabupaten Way Kanan	43%	2,086,482,310.00

02	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terbayarnya honor pendamping desa, pendamping lokal desa dan tenaga ahli	Kab. Way Kanan	111 Pendamping Desa	-	200,403,600.00	-	200,403,600.00	APBD Kabupaten Way Kanan	-	111 Pendamping Desa	220,443,960.00
02	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah poskesdes yang mendapatkan pembinaan tentang posyandu	Kab. Way Kanan	3 Poskesdes	-	65,346,000.00	-	65,346,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	-	3 Poskesdes	71,880,600.00
8	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen data TTG dan jumlah Pameran / Gelar TTG	Kab. Way Kanan	221 Kampung dan 1 Kali gelar TTG	-	195,352,900.00	-	195,352,900.00	APBD Kabupaten Way Kanan	-	221 Kampung dan 1 Kali gelar TTG	214,888,190.00
02	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Pelaksanaan karya bhakti dan TMMD reguler di Kabupaten	Kab. Way Kanan	1 Kecamatan	-	1,116,900,000.00	-	1,116,900,000.00	APBD Kabupaten Way Kanan	-	1 Kecamatan	1,228,590,000.00
02	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya program kerja PKK kab. way kanan	Kab. Way Kanan	1 Tahun	-	318,799,600.00	-	318,799,600.00	APBD Kabupaten Way Kanan	-	1 Tahun	350,679,560.00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									4,686,626,600.00	3,271,942,385.00	5,000,000.00	7,963,568,985.00				8,759,925,883.50

Blambangan Umpu, April 2020
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

IXUAN AHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19751101 199503 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 050/ 6 /IV.13-WK/2022
 TANGGAL : 9 MEI 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2021-2026**

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9					
1.	Menin Gkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK.	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
3.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

**KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,**



IKHUAN AHMADI, S.Sos., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19751101 199503 1 001